



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKjIP)



KECAMATAN KENOHAN TAHUN 2023

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
KECAMATAN KENOHAN
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KENOHAN
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kenohan Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Kecamatan Kenohan Tahun 2023, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Kecamatan Kenohan disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan program/kegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kenohan Tahun 2021 – 2026 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKjIP Kecamatan Kenohan Tahun 2023 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Kenohan kepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Kenohan, 18 Februari 2024
Camat

H. Kaspul, SE, M.Si

NIP. 19680409 198903 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Tupoksi	2
1.4 Permasalahan dan Isu Strategis	3
1.5 Uraian Singkat Organisasi	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1 Perencanaan Strategis	8
2.2 Perjanjian Kinerja	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1 Capaian Kinerja	18
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2023	31
BAB IV PENUTUP	36
4.1 Kesimpulan	36
4.2 Perbaikan Kedepan	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP PMR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kenohan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

1.3.1. Tugas Pokok

Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

1.3.2. Fungsi Utama

Fungsi dari Perangkat Daerah Kecamatan Kenohan yaitu :

1. Pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk data baserta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
2. Perencanaan strategis di bidang perencanaan kegiatan Kecamatan;
3. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati;
4. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
6. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
7. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
8. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa

- dan/atau Kelurahan;
9. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
 10. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya;
 11. Penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan, pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkungan Kecamatan
 12. Fasilitasi dan Pembinaan terhadap Desa/Kelurahan serta Lembaga Kemasyarakatan

1.4 Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan Kecamatan Kenohan dalam melaksanakan tupoksinya adalah masih lemahnya/belum optimalnya pola Koordinasi fasilitasi, Motivasi lintas sektor di setiap Tupoksi Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Kesejahteraan Masyarakat, Aset Pertanahan dan keamanan wilayah yang disebabkan :

- a. Kualitas SDM yang belum memadai;
- b. Etos kerja yang belum terbina secara optimal;
- c. Terbatasnya Anggaran Pembangunan Skala Kecil Kecamatan;
- d. Belum optimalnya peran Masyarakat dalam pembangunan.

Sedangkan permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Kenohan secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Permasalahan di Bidang Pemerintahan:

- 1) Urusan Kependudukan memiliki permasalahan :
 - a. Bahwa masih banyak warga yang belum melakukan Perekaman KTP-eL;
 - b. Masih banyak warga yang mutasi atau pindah tidak melapor sehingga kevalidan data penduduk sulit di capai.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengatasi masalah tersebut di atas antara lain melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil disetiap kesempatan selalu melaksanakan sosialisasi ke Kecamatan, hal ini tentunya sangat berdampak positif bagi masyarakat, dengan harapan 100%. Warga sudah mempunyai KK serta secara keseluruhan dapat mengikuti proses perekaman KTP-Elektronik, dan masih banyak KTP Elektronik yang belum jadi sehingga menimbulkan keresahan warga.

2) Pembinaan Perangkat memiliki Permasalahan:

- a. Masih perlu peningkatan sumber daya manusia Aparatur Kelurahan serta sarana komputer yang memadai agar setiap program pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat efektif dan efisien;
- b. Sistem administrasi Produk Hukum, Kependudukan dan urusan Pemerintahan kurang tertata.

Upaya yang telah dilakukan:

1. Perlu pelatihan peningkatan kapasitas SDM aparatur di Kecamatan;
2. Pengalokasian anggaran untuk belanja kebutuhan sarana dan prasarana administrasi;
3. Perlu pembinaan secara berkesinambungan tentang Produk hukum narasumber dari Pemerintah Kabupaten dan praktisi hukum.

B. Permasalahan di Bidang Pertanahan Dan Aset :

- a. Masih Banyak Kasus-kasus tumpang tindih kepemilikan tanah sehingga menimbulkan konflik,
- b. Adanya SKPT ganda,
- c. Masyarakat yang memiliki SKPT tidak berada di wilayah setempat (luar kota) sehingga menyulitkan penyelesaian konflik kepemilikan tanah.

Upaya yang telah dilakukan

Dilakukan inventarisasi penyelesaian kasus tanah secara berjenjang dan bertahap, dan melakukan pengukuran menggunakan GPS untuk mengurangi kesalahan ukuran dan batas-batas kepemilikan tanah.

Melakukan sosialisasi terhadap pemilik tanah yang bukti kepemilikannya hanya SKPT untuk melakukan pendaftaran ulang SKPT/pemutakhiran SKPT dari ukuran manual diganti dengan GPS.

C. Permasalahan di Bidang Ekonomi Pembangunan & Pemberdayaan Perempuan,

- a. Masih banyaknya pengajuan proposal baik di bidang pembangunan maupun di bidang perekonomian yang masih belum direalisasi;
- b. Minimnya sosialisasi dari Stake Holder yang membidangi baik dari pemerintah maupun dari lembaga lain;
- c. Lemahnya koordinasi antara masyarakat dengan pihak pemerintah.

Upaya yang telah dilakukan:

Berupaya untuk memfasilitasi terlaksananya sosialisasi, koordinasi antara masyarakat, lembaga yang berada di tingkat Kelurahan maupun kecamatan dengan stake holder atau dinas terkait.

D. Permasalahan di Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan :

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan bagi warga dan lingkungan;
- b. Banyaknya pernikahan usia muda (20 tahun kebawah);
- c. Sosialisasi KPR (kesehatan reproduksi keluarga masih dirasa kurang);
- d. Kurang adanya koordinasi dan keterbukaan dengan para instansi maupun lembaga yang membidangi dengan para generasi muda yang terhimpun dalam karang taruna di masing-masing wilayah.

Upaya yang telah dilakukan :

- a. Meningkatkan peran Institusi masyarakat dan meningkatkan penyuluhan oleh kesehatan dan dinas Sektoral tentang pentingnya menjaga kesehatan serta memanfaatkan momentum kegiatan-kegiatan dalam penyuluhan secara langsung, berkala dan terpadu utamanya kegiatan Posyandu serta memanfaatkan momentum dalam memecahkan masalah;
- b. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam peningkatan kesempatan kerja sama dengan Lurah untuk memaksimalkan peran kader dan institusi masyarakat dalam peningkatan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya memaksimalkan pencapaian target KB;
- c. Adanya pengajuan program pembangunan melalui proposal yang beragam dan cukup banyak untuk mendapatkan tanda tangan persetujuan Camat, baik yang berupa pengajuan proposal pembangunan fisik maupun non fisik yang bersifat untuk kepentingan masyarakat;
- d. Telah dicukupinya kelengkapan administrasi dan inventarisasi proyek;
- e. Telah dilakukan koordinasi dengan instansi/lembaga serta karang taruna yang ada di wilayah guna menumbuh kembangkan bakat dan kemampuan para generasi muda.

E. Permasalahan di Bidang Trantibum, Sektor Keamanan Lingkungan Masyarakat :

- a. Minimnya kesadaran masyarakat bahwa keamanan lingkungan adalah

- tanggung jawab bersama;
- b. Belum ada kepedulian masyarakat terhadap antisipasi bencana di masing-masing lingkungan;
 - c. Masih tingginya penggunaan Miras dan Narkoba;
 - d. Minimnya kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

Rekomendasi :

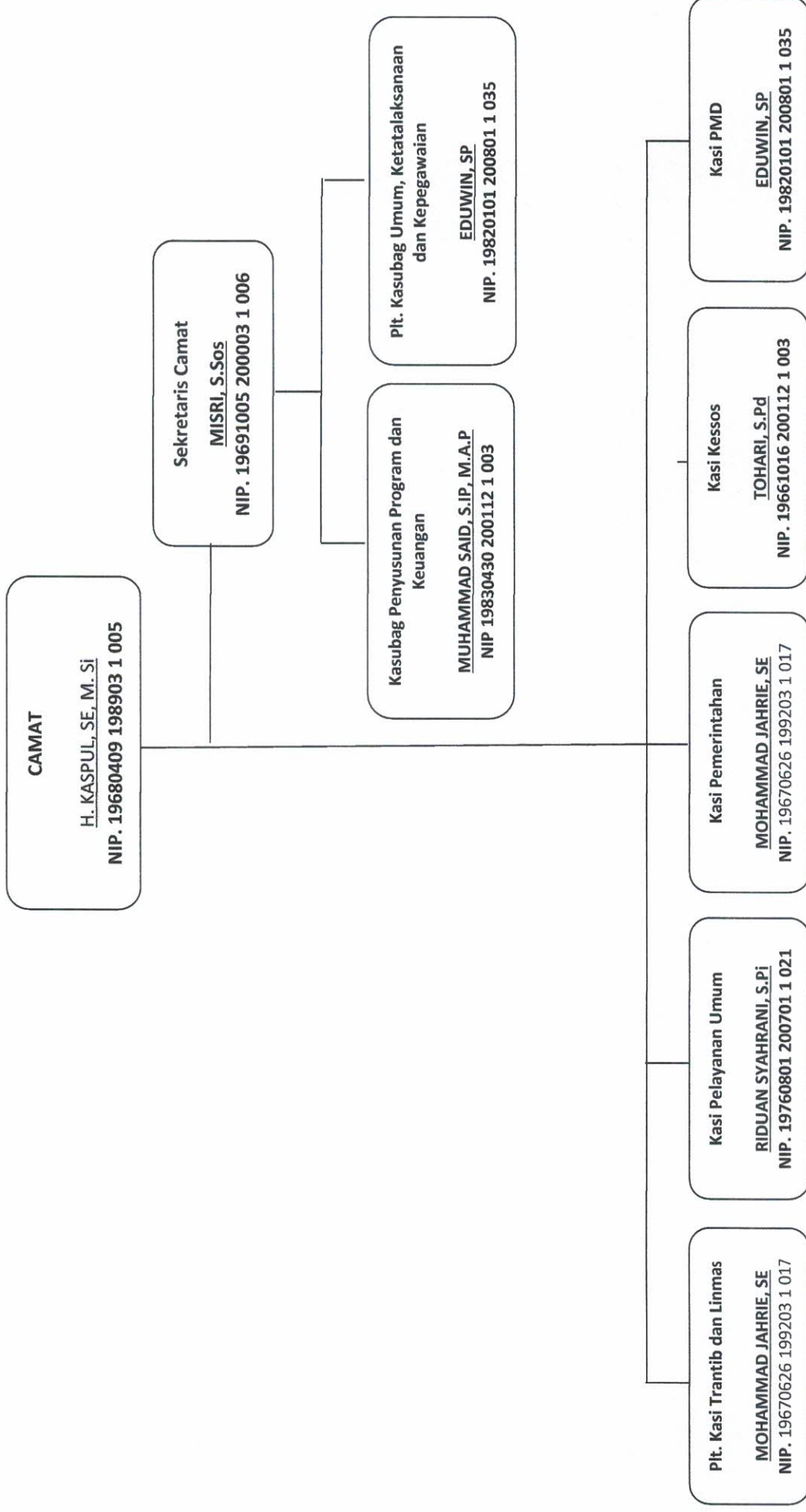
- 1. Mengadakan rapat pembinaan Linmas dan Koordinasi satgas yang lain;
- 2. Pembentukan unit Operasional Penanggulangan bencana Pembentukan satuan Linmas tanggap bencana;
- 3. Mengadakan Sosialisasi secara berkala;
- 4. Meningkatkan kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

1.5 Uraian Singkat Organisasi

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana dalam pasal 126 menerangkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Selain tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kecamatan juga merupakan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati / Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menjalankan tugasnya seorang Camat dibantu oleh seorang Sekretaris Camat (Sekcam), beberapa Kepala seksi (Kasi) dan Kepala Sub Bagian (Kasubag) yang masing-masing membawahi beberapa orang staf. Untuk lebih jelasnya tentang struktur organisasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Camat Kenohan bisa dilihat pada bagan berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR CAMAT KENOHAN**



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

2.1.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 yaitu “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul Dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah, maka misi yang relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kenohan adalah Misi ke-1 yaitu Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani. Kemudian merujuk kepada misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Kenohan Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi :				
"Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia"				
Misi yang Relevan	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti
				Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa
				Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan

2.1.3 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi SKPD Kecamatan Kenohan untuk periode 2021- 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
3. Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
4. Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
6. Meningkatkan kinerja dan tata kelola kecamatan

2.1.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan SKPD

Kantor Camat Kenohan Tahun 2021 - 2026 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Strategi dan Arah Kebijakan

No.	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
		Meningkatkan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
		Meningkatkan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
2.	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
3.	Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		Meningkatkan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
4.	Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatkan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
5.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
6.	Meningkatnya kinerja dan tata kelola kecamatan	Meningkatkan fasilitas penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah

2.1.5 Program

Program yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kenohan untuk mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2023, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
-------------------	-------------------	---------

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Kenohan	Predikat Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kenohan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Kecamatan Kenohan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Meningkatnya aksesibilitas antar dan inter wilayah Kecamatan Kenohan	Cakupan Aksesibilitas Antar Wilayah Kecamatan Kenohan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Kenohan Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT BERHASIL/ GAGALNYA CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Keluhan Masyarakat Terhadap pelayanan Kecamatan yang ditindaklanjuti	Persentase	100	94,44	94,44 %	= 94,44/100*100%	Faktor Pendukung = Ada Penambahan Perangkat Dari Instansi Terkait. Dan Faktor Penghambat = Kondisi Jaringan Internet yang tidak stabil, perbaikan kerusakan peralatan (alat perekaman) yang harus memakan waktu cukup lama dikarenakan harus dibawa ke Kabupaten.
		Presentase Capaian Ketentraman dan ketertiban umum	Persentase	80	80	100%	= 80 / 80* 100%	Faktor Pendukung = Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan berjalan dengan baik antara Pemerintah Kecamatan dengan TNI dan Polri. Dan Faktor Penghambat = Kurangnya staf pendukung yang ada di bagian trantib
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	35	0	0%	= 35/35*100%	Faktor Pendukung = Sudah Dibentuknya Badan Usaha Miiik Desa (BUMDES) untuk setiap desa di Kecamatan Kenohan Dan Faktor Penghambat = Masih lemahnya aturan terkait pendapatan asli desa, Sosialisasi dari pihak terkait, dan Keterbatasan dana serta belum semua kekayaan aset Desa dapat dimanfaatkan secara optimal
2	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK /Inspektorat pada tahun berjalan maka wajib ditindaklanjuti	Persen	100	100	100%	= 100/100*100%	Faktor Pendukung = Temuan Hasil Pemeriksaan BPK Sudah Selesai Ditindak Lanjuti. Dan Faktor Penghambat = Tidak Ada

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT BERHASIL/ GAGALNYA CAPAIAN KINERJA
	daerah	paling lambat 60 hari kerja						
3	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persen	100	100	100%	$= 100/100 \times 100\%$	Faktor Pendukung = Pelaksanaan Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran Tidak dilaksanakan, karena Aset Dalam Penelusuran Sudah Tidak Ada Pada Kecamatan Kenohan. Dan Faktor Penghambat = Tidak Ada
4	Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa	Persen	100	100	100%	$= 100/100 \times 100\%$	Faktor Pendukung = Input Pada Aplikasi SIRUP Dilaksanakan Sesuai Jadwal, dan Faktor Penghambat = Tidak Ada
5	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100%	$= 100/100 \times 100\%$	Faktor Pendukung = Seluruh Pejabat Struktural Kantor Camat Kenohan Melakukan Pelaporan LHKPN Tepat Waktu, dan Faktor Penghambat = Tidak Ada

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT BERHASIL/ GAGALNYA CAPAIAN KINERJA
	Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100%	$= 100/100 \times 100\%$	Faktor Pendukung = Seluruh Pegawai Kantor Camat Kenohan Melakukan Pelaporan LHKASN Tepat Waktu, dan Faktor Penghambat = Tidak Ada
6	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Daerah	Predikat	B (60 -70)	65	100%	$= 65/65 \times 100\%$	Faktor Pendukung = Terpenuhi Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Arsip, dan Faktor Penghambat = Masih Terbatasnya SDM Untuk Jabatan Arsiparis
7	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukur dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100	100	100%	$= 100/100 \times 100\%$	Faktor Pendukung = Tidak Ada , dan Faktor Penghambat = Tidak Tersedianya Data Dukung Yang Diberikan Oleh Kasi dan PPTK Pengampu Kegiatan Sehingga Menyulitkan Petugas Dalam Melakukan Proses Input Pelaporan
8	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi	Jumlah Inovasi	Jumlah	1	0	0%	$= 0/1 \times 100$	Faktor Pendukung = Tidak Ada , dan Faktor Penghambat = Kesulitan Dalam Menemukan Ide Perbaikan Sehingga Tidak Ada Inovasi Yang Bisa Dibuat

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT BERHASIL/ GAGALNYA CAPAIAN KINERJA
	perangkat daerah							
9	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100	100	100%	$= 100/100 * 100\%$	Tidak Terdapat Utang Atas Belanja Paket Pekerjaan Pada Tahun 2023
10	Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100	100	100%	$= 100/100 * 100\%$	Paket Pekerjaan Terealisasi 100%
		Persentase realisasi keuangan	Persen	100	100	100%	$= 100/100 * 100\%$	Realisasi Berdasarkan Laporan Serapan Anggaran Atau LRA Pada Laporan Keuangan
11	Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari	Laporan	2	2	100%	$= 2/2 * 100\%$	Laporan Manajemen Risiko Telah Disampaikan
12	Melaksanakan revaluasi awal terhadap Indikator	Dokumen Revaluasi Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1	0	0%	$= 0/1 * 100\%$	Tidak Melakukan Revaluasi Atas IKU

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT BERHASIL/ GAGALNYA CAPAIAN KINERJA
	Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini							
13	Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BerAKHLAK"	Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, Tim budaya kerja	Kegiatan	4	1	25%	$= 1/4 * 100\%$	Kegiatan Yang Dilaksanakan Apel ASN DII
14	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100	100	100%	$= 100/100 * 100\%$	ASN Sudah Mengikuti Pengembangan Kompetensi Lebih Dari 20 JP
15	Meningkatnya Indeks Kesehatan Keluarga di Kecamatan	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Angka	0,40	0,27	67,5%	$= 0,27/0,40 * 100\%$	Nilai Diperoleh Dari Puskesmas Kecamatan Kenohan
16	Terlaksananya koordinasi konvergensi penurunan stunting di Kecamatan	Penurunan Prevalensi stunting	Persen	16,5	32,23	195,33%	$= 32,23/16,5 * 100$	Nilai Diperoleh Dari Puskesmas Kecamatan Kenohan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN	FORMULASI PERHITUNGAN	PENJELASAN FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT BERHASIL/ GAGALNYA CAPAIAN KINERJA
17	Menurunkan Angka Kematian Ibu	Angka Kematian Ibu (AKI) di kecamatan	Angka	1	0,4	40%	$= 0,4/1 \times 100$	Nilai Diperoleh Dari Puskesmas Kecamatan Kenohan
18	Mewujudkan Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Persentase Desa/Kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	Persen	45	43	95%	$= 43/45 \times 100$	Nilai Diperoleh Dari Puskesmas Kecamatan Kenohan
19	Meningkatnya Posyandu Aktif	Persentase Posyandu Aktif	Persen	100	100	100%	$= 100/100 \times 100$	Seluruh Posyandu Yang Ada Di Kecamatan Kenohan Aktif Melakukan Kegiatan
20	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Persen	100	100	100%	$= 100/100 \times 100$	Sudah disosialisasinya dan ditempelkan pengumuman bahwa kantor camat kenohan bebas asap rokok

Tabel 2.6
Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Dengan Data Awal Tahun 2022 dan Target Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran			Satuan	Data Awal (2022)	Target 2023	Target Akhir Renstra 2023
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti			Persentase	100	100	100
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Persentase	100	100	100
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa			Persen	100	0	0
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan			Persen	35	0	0
2	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK /Inspektorat pada tahun berjalan maka wajib ditindaklanjuti paling lambat 60 hari kerja			Persen	100	100	100
3	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah			Persen	100	100	100
4	Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dari jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan arfuntabel	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa			Persen	100	100	100
5	Memajukan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023			Persen	100	100	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023			Persen	100	100	100
6	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah			Predikat	Baik (B) 60-70	Baik (B) 60-70	Baik (B) 60-70

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Data Awal (2022)	Target 2023	Target Akhir Renstra 2023
7	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100	100	100
8	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah.	Jumlah Inovasi	Jumlah	0	1	1
9	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100	100	100
10	Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100	100	100
		Persentase realisasi kegiatan Keuangan	Persen	100	100	100
11	Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari	Laporan	2	2	2
12	Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1	1	1
13	Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BERAHLAK"	Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, Tim budaya kerja	Kegiatan	0	4	4
14	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	0	100	100
15	Meningkatnya Indeks Kesehatan Keluarga di Kecamatan	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Angka	*)	0,40	0,40

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Data Awal (2022)	Target 2023	Target Akhir Renstra 2023
16	Terlaksananya ko ordinasi konvergensi penurunan stunting di Kecamatan	Penurunan Prevalensi stunting	Persen	*)	16,5	16,5
17	Menurunnya Angka Kematian Ibu	Angka Kematian Ibu (AKI) di kecamatan	Angka	*)	1	1
18	Memujudkan Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Persentase Desa/ Kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan	Persen	*)	45	45
19	Meningkatnya Posyandu Aktif	Persentase Posyandu Aktif	Poin	*)	100	100
20	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	0	100	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

3.1 Capaian Kinerja

Kerangka pengukuran capaian kinerja Kecamatan Kenohandilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut:

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Rata-rata realisasi kinerja Kecamatan Kenohan tahun 2023 sebesar 91,07 %. Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja **Sangat Tinggi**. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Keluhan Masyarakat Terhadap pelayanan Kecamatan yang ditindaklanjuti	Persentase	75	94,44	94,44%	Sangat tinggi
		Persentase Capaian Ketentraman dan ketertiban umum	Persentase	80	80	80%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK /Inspektorat pada tahun berjalan maka wajib ditindaklanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
3	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna	Persentase Pelaksanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian
	Barang Milik Daerah						
4	Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
5	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
		Tingkat Kepatuhan serta kelengkapan LHKASN Per tanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
6	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60-70	Baik(B) 75,26	75,26%	Sedang
7	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan data di aplikasi satu data Kukar	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
8	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat Daerah	Jumlah Inovasi	Jumah	1	0	0	Sangat Rendah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian
9	Terealisasinya output kegiatan tanpa menimbulkan potensi utang	Capaian Ouput Kegiatan	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
10	Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
		Persentase realisasi keuangan	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
11	Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari	Laporan	2	2	100%	Sangat Tinggi
12	Melaksanakan reuiu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini	Dokumen Reuiu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1	0	0%	Sangat Rendah
13	Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BerAKHLAK"	Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, Tim budaya kerja	Kegiatan	4	1	25%	Rendah
14	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
15	Meningkatnya Indeks Kesehatan Keluarga di Kecamatan	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Angka	0,40	0,27	67,5%	Sedang
16	Terlaksananya koordinasi konvergensi penurunan stunting di Kecamatan	Penurunan Prevalensi stunting	Persen	16,5	32,23	195,33%	Sangat Tinggi
17	Menurunnya Angka Kematian Ibu	Angka Kematian Ibu (AKI) di kecamatan	Angka	1	0,4	40%	Rendah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian
18	Mewujudkan Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Persentase Desa/Kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	Persen	45	43	95%	Sangat Tinggi
19	Meningkatnya Posyandu Aktif	Persentase Posyandu Aktif	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
20	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
Jumlah				100%	91,21	91,21	

Adapun penjelasan capaian dari setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1) Indikator Kinerja ke-1

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-1” tahun 2023 yaitu memperoleh nilai 75 dan realisasinya sebesar 94,44 atau capaian kinerja yang diperoleh sebesar 94,44%, sehingga target kinerja tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu Kecamatan Kenohan belum menerima penilaian hasil evaluasi. Sehingga untuk indikator Persentase Keluhan Masyarakat Terhadap pelayanan Kecamatan yang ditindaklanjuti

2) Indikator Kinerja ke-2

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-2” tahun 2023 yaitu Presentase Capaian Ketentraman dan ketertiban umum sebanyak 80 % hasil tindak lanjut diatas capaian kinerja yang diperoleh yaitu sehingga target kinerja tidak tercapai dengan kriteria penilaian tinggi

3) Indikator Kinerja ke-3

Target kinerja indikator ke-3 tahun 2023 yaitu sebesar 0% dari Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa, dan terealisasi sebesar 0%,. Atas hasil tersebut capaian kinerja yang diperoleh sebesar 0%, sehingga target kinerja tidak tercapai dengan kriteria penilaian sangat rendah

4) Indikator Kinerja ke-4

Target kinerja indikator ke-4 tahun 2023 yaitu sebesar 100% dari Temuan Hasil Pemeriksaan BPK /Inspektorat pada tahun berjalan maka wajib ditindaklanjuti paling lambat 60 hari kerja, dan tersealisasi sebesar 100%. Jadi atas hasil capaian kinerja target indikator ke-4 sebesar 100% dengan capaian kriteria penilaian sangat tinggi.

5) Indikator Kinerja ke-5

Target kinerja indikator ke-5 tahun 2023 yaitu sebesar 100%. Dari target Persentase ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2023), Kecamatan Kenohan sudah menginput seluruh pengadaan yang ada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran di Aplikasi SiRUP, sehingga realisasi target yang tercapai yaitu sebesar 100% dengan kriteria penilaian sangat tinggi.

6) Indikator Kinerja ke-6

Target kinerja indikator ke-6 tahun 2023 yaitu sebesar 100%, berdasarkan hasil monitoring dari 7 pejabat struktural yang wajib lapor semuanya sudah mengisi LHKPN di website <https://elhkpn.kpk.go.id> sebelum tanggal 31 maret 2023. Untuk indikator ke-7 diperoleh realisasi sebesar 100% dengan kriteria penilaian sangat tinggi.

7) Indikator Kinerja ke-7

Target kinerja indikator ke-7 tahun 2023 yaitu sebesar 100%, berdasarkan hasil monitoring 11 ASN yang mengisi LHKASN di website <https://siharka.menpan.go.id> sebelum tanggal 31 maret 2023, sehingga diperoleh realisasi capaian target sebesar 100% dengan kriteria penilaian sangat tinggi.

8) Indikator Kinerja ke-8

Target kinerja indikator ke-8 pada tahun 2023 yaitu memperoleh predikat/nilai sebesar Baik(B) 60-70. Untuk indikator tata kelola arsip perangkat daerah. Kecamatan Kenohan memperoleh predikat/nilai Baik(B) 65 dari hasil audit tim tata kelola arsip perangkat daerah. Berdasarkan hasil tersebut, capaian realisasi kinerja pada indikator ini sebesar 100% dengan kriteria penilaian sedang Kedepannya Kecamatan Kenohan akan melengkapi sarana dan prasarana dalam pengelolaan

arsip serta berkoordinasi dan konsultasi dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan bagaimana Standar (SOP) dalam pengelolaan arsip dengan baik dan benar.

9) Indikator Kinerja ke-9

Indikator kinerja ke-9 yaitu Persentase ketersediaan data di aplikasi satu data Kukar dengan target sebesar 100%. sebesar 100%. Dari hasil tersebut target indikator ke-9 terealisasi sesuai target sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 100% dengan kriteria penilaian sangat tinggi.

10) Indikator Kinerja ke-10

Indikator kinerja ke-10 yaitu inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat Daerah dengan target pada tahun 2023 yaitu sebanyak 0 Inovasi. sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 0% dengan kriteria penilaian sangat rendah.

11) Indikator Kinerja ke-11

Indikator kinerja ke-11 yaitu Melakukan pengendalian terhadap verifikasi dan validasi data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta berkoordinasi dalam rangka penurunan angka kemiskinan di wilayahnya dengan target pada tahun 2023 yaitu sebesar 2 Laporan. Dari target yang ada tingkat ketersediaan data yang ada di Kecamatan Kenohan sebesar 2 Laporan Data ini diperoleh dari data internal/primer yang ada pada seksi Kesejahteraan sosial Kecamatan Kenohan, maka capaian kinerja yang diperoleh sebesar 100%

12) Indikator Kinerja ke-12

Indikator kinerja ke-12 yaitu Terealisasinya output kegiatan tanpa menimbulkan potensi utang dengan target pada tahun 2023 yaitu sebesar 100%. Dari target yang ada tingkat ketersediaan data yang ada di Kecamatan Kenohan sebesar 100%. Data ini diperoleh dari data internal/primer yang ada CALK Kecamatan Kenohan Tahun 2023

13) Indikator Kinerja ke-13

Indikator kinerja ke-13 yaitu persentase realisasi kegiatan fisik. Untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2023 seluruhnya terlaksana dan terealisasi sebesar 100%, tidak ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan. Jadi, untuk indikator ini capaian kinerja yang diperoleh sebesar **100%** dengan predikat sangat tinggi.

14) Indikator Kinerja ke-14

Indikator kinerja ke-14 yaitu persentase realisasi keuangan. Untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2023 pada kantor camat Kenohan seluruhnya terlaksana dan persentase realisasi keuangan sampai dengan akhir tahun (per 31 desember 2023) sebesar 91,21%, dari pagu anggaran setelah perubahan sebesar Rp.30.635.484.520,- direalisasikan sebesar Rp.27.941.589.993,-. Jadi, untuk indikator tambahan ini capaian kinerja yang diperoleh kantor camat kembang janggut sebesar 91,21% dengan predikat sangat tinggi.

15) Indikator Kinerja ke-15

Indikator kinerja tambahan ke-15 yaitu Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko disampaikan maksimal 10 Januari 2023. Untuk laporan manajemen risiko dan laporan pengendalian risiko telah disampaikan. Jadi, untuk indikator ini capaian kinerja yang diperoleh sebesar 100% dengan predikat sangat tinggi.

16) Indikator Kinerja ke-16

Indikator kinerja tambahan ke-16 yaitu Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama. Untuk Tahun 2023 tidak dilaksanakan Reviu atas dokumen indikator kinerja utama yang ada pada Kecamatan Kenohan. Jadi, untuk indikator ini capaian kinerja yang diperoleh sebesar 0% dengan predikat sangat rendah.

17) Indikator Kinerja ke-17

Indikator kinerja tambahan ke-17 yaitu Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BERAHLAK". Untuk Tahun 2023 Kecamatan Kenohan sudah melaksanakan ini seperti apel dll. Jadi, untuk indikator ini capaian kinerja yang diperoleh sebesar 25% dengan predikat rendah.

18) Indikator Kinerja ke-18

Indikator kinerja tambahan ke-18 yaitu Persentase Pengembangan Kompetensi ASN. Untuk Tahun 2023 Kecamatan Kenohan sudah melakukan pembinaan dan pengembangan Aparatur Sipil Negara yang ada dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Kabupaten baik itu secara online dan offline dengan total jumlah jam pelajaran sebanyak 20 JP. Jadi, untuk indikator ini capaian kinerja yang diperoleh sebesar 100% dengan predikat sangat tinggi.

19) Indikator Kinerja ke-19

Indikator kinerja tambahan ke-19 yaitu Indeks Keluarga Sehat (IKS). Untuk Tahun 2023 Kecamatan Kenohan memperoleh nilai indeks keluarga sehat sebesar 0,27 dari target sebesar 0,4. Data ini diperoleh dari Laporan Puskesmas Kecamatan Kenohan Jadi, untuk indikator ini capaian kinerja yang diperoleh sebesar 67,5% dari target yang ada dengan predikat sedang.

20) Indikator Kinerja ke-20

Indikator kinerja tambahan ke-20 yaitu penurunan prevalensi stunting. Untuk Tahun 2023 Kecamatan Kenohan memperoleh nilai persentase prevalensi stunting sebesar 32,23% Data ini diperoleh dari Laporan Puskesmas Kecamatan Kenohan berdasarkan data jumlah stunting yang ada dalam wilayah kerja puskesmas kenohan tahun 2023. Jadi, untuk indikator ini capaian kinerja yang diperoleh sebesar 195,33 % dari target yang ada dengan predikat sangat tinggi. Hasil perhitungan penurunan prevalensi stunting adalah sebagai berikut :

Adapun capaian kinerja untuk persentase indikator penurunan prevalensi stunting yaitu

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \\ &= \frac{32,23}{16,5} \times 100 \\ &= 195,33\% \end{aligned}$$

21) Indikator Kinerja ke-21

Indikator kinerja tambahan ke-21 yaitu Angka Kematian Ibu (AKI) di Kecamatan Kenohan, target yang ditetapkan untuk nilai angka kematian ibu yaitu sebesar 1 (satu), dan hasil dari laporan Puskesmas Kecamatan Kenohan sasaran ibu hamil sebanyak 220 orang selama tahun 2023 dapat dilaporkan ada terjadi kasus kematian ibu (kematian ibu nifas) sebanyak 1 orang di Kecamatan Kenohan. untuk indikator ini realisasi kinerja yang diperoleh sebesar 0,40% dari data Puskesmas Kecamatan Kenohan jadi untuk indikator ini capaian kinerja yang diperoleh sebesar 40% dari target yang ada dengan predikat rendah.

22) Indikator Kinerja ke-22

Indikator kinerja tambahan ke-22 yaitu Persentase Desa/ Kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) di Kecamatan Kenohan, target yang ditetapkan yaitu sebesar 45% dari jumlah desa yang ada, dan untuk tahun 2023 dari 9 desa yang memenuhi persyaratan stop buang air besar sembarangan. untuk indikator ini realisasi kinerja yang diperoleh sebesar 43% dari data Puskesmas Kecamatan Kenohan Jadi untuk indikator ini capaian kinerja yang diperoleh sebesar 95% dari target yang ada dengan predikat sangat tinggi.

23) Indikator Kinerja ke-23

Indikator kinerja tambahan ke-23 yaitu Persentase Posyandu Aktif di Kecamatan Kenohan, Diperoleh sebesar 100% dari jumlah posyandu yang ada sebanyak 23, kesemua posyandu aktif dalam melaksanakan kegiatan secara berkala. Jadi, untuk indikator tambahan ini realisasi kinerja dengan predikat sangat tinggi.

24) Indikator Kinerja ke-24

Indikator kinerja tambahan ke-24 yaitu Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran, pada indikator terakhir ini di Kantor Camat Kenohan sudah direalisasikan, di sosialisasikan dan di tempelnya pengumuman untuk tidak merokok sembarangan. Jadi, untuk indikator ini realisasi kinerja sebesar 100% dengan predikat sangat tinggi.

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 94,44%. Sedangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2022) sebesar 83,55%. Terjadi peningkatan kinerja sebesar 8%. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

No.	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket.
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
A Indikator Kinerja Utama											
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	A1	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	100	83,55	100%	100	94,44	94,44 %	Naik
		A2	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	65	65	100%	80	80	100%	Tetap
		A3	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	5	0	0%	0	0	0%	Tetap
		A4	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Nilai	1	0	0%	0	0	0%	Tetap
B Indikator Kinerja Tambahan											
1	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) / Inspektorat Daerah	B1	Temuan Administrasi BPK/ Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	1	1	100%	1	1	100%	Tetap
2	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	B2	Persentase Pelaksanakan dan Pelaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna BMD	Persen	100	100	100%	100	100	100%	Tetap
3	Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dari jasa yang menjadi kewenangannya secara efsien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan	B3	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa	Persen	100	100	100%	100	100	100%	Tetap

No.	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket.
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
	akuntabel										
4	Memujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	B4	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100%	100	100	100%	Tetap
		B5	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100%	100	100	100%	Tetap
5	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	B6	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60-70	65	76,92 %	Baik (B) 60-70	65	76,92 %	Tetap
6	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan fungsi Perangkat Daerah	B7	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100	100	100%	100	100	100%	Tetap
7	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah.	B8	Jumlah Inovasi	Jumlah	0	0	0%	1	0	0%	Tetap
8	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	B9	Capaian Output Kegiatan	Persen	100	100	100%	100	100	100%	Tetap
7	Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	B10	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100	100	100%	100	100	100%	Tetap
		B11	Persentase realisasi kegiatan Keuangan	Persen	100	86,90	86,90 %	100	91,21	91,21 %	Meningkat
8	Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya	B12	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10	Laporan	2	2	100%	2	2	100%	Tetap

No.	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket.
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
			Januari								
9	Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini	B13	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dok	1	0	0%	1	0	0%	Tetap
10	Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BERAHLAK"	B14	Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, Tim budaya kerja	Keg	4	0	0%	4	1	25%	Meningkat
11	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	B15	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100	0	0%	100	100	100%	Meningkat
12	Meningkatnya Indeks Kesehatan Keluarga di Kecamatan	B16	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Angka	0	0	0%	0,4	0,27	67,5%	Meningkat
13	Terlaksananya koordinasi konvergensi penurunan stunting di Kecamatan	B17	Penurunan Prevalensi stunting	Persen	0	0	0%	16,5	32,23	195,33 %	Meningkat
14	Menurunnya Angka Kematian Ibu	B18	Angka Kematian Ibu (AKI) di kecamatan	Angka	0	0	0%	1	0,40	40%	Meningkat
15	Memujudkan Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	B19	Persentase Desa/ Kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	Persen	0	0	0%	45	43	95%	Meningkat
16	Meningkatnya Posyandu Aktif	B20	Persentase Posyandu Aktif	Poin	0	0	0%	100	100	100%	Meningkat
17	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah	B21	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	0	0	0%	100	100	100%	Meningkat

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan realisasi kinerja Kecamatan Kenohan sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2023	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2023
1	Persentase Keluhan Masyarakat Terhadap pelayanan Kecamatan yang ditindaklanjuti	Nilai	80	80	100 %
2	Presentase Capaian Ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah	1	1	100%
3	Persentase Ketepatan Waktu dan kesesuaian Input Rencana Umum pengadaan pada Aplikasi SIRUP (Maksimal 7 Hari kerja setelah penandatanganan PK Tahun 2023 dan maksimal 14 Hari kerja setelah RAPBD Tahun 2023	Persen	100	100	100%
4	Tingkat Kepatuhan serta kelengkapan LHKPN Per tanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100%
5	Tingkat Kepatuhan serta kelengkapan LHKASN Per tanggal 31 Maret 2023	Predikat	100	100	100%
6	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai	Baik (60-70)	65	100%
7	Persentase ketersediaan data di aplikasi satu data Kukar	Persen	100	100	100%
8	Jumlah Inovasi	Persen	100	100	100%
9	Capaian Ouput Kegiatan	Kegiatan	1	1	100%
10	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100	100	100%
11	Persentase realisasi keuangan	Persen	100	100	100%

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2023	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2023
12	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari	Laporan	2	2	100%
13	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1	0	0%
14	Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, Tim budaya kerja	Kegiatan	4	1	25%
15	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100	100	100%
16	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Angka	0,40	0,27	67,5%
17	Penurunan Prevalensi stunting	Persen	16,5	32,23	195,33%
18	Angka Kematian Ibu (AKI) di kecamatan	Angka	1	0,4	40%
19	Persentase Desa/Kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	Persen	45	43	95%
20	Persentase Posyandu Aktif	Persen	100	100	100%
21	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Persen	100	100	100%

3.1.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih. Penghitungannya dengan cara mengurangkan

persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran dengan kategori penilaian yaitu :

- Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.
- Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian sasaran indikator kinerja utama dan sasaran indikator kinerja tambahan dan persentase penyerapan anggaran dan rincian efisiensi penggunaan sumber daya pada Kecamatan Kenohan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi (Rp.)	% Realisasi	Ket.
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	23.973.158.950	22.407.490.412	93,47%	Efisien
2	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) / Inspektorat Daerah		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.020.701.570	5.000.850.581	83,06%	Efisien
3	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah						
4	Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dari jasa yang menjadi kewenangannya						

No	Sasaran	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi (Rp.)	% Realisasi	Ket.
	secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan arfuntabel						
5	Memujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)						
6	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah						
7	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan fungsi Perangkat Daerah						
8	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang						
9	Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan						
10	Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya						
11	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah.						
12	Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat						

No	Sasaran	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi (Rp.)	% Realisasi	Ket.
	daerah sesuai dengan data terkini						
13	Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BERAHLAK"						
14	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun						
15	Meningkatnya Indeks Kesehatan Keluarga di Kecamatan		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	35.000.000	4.050.000	11,57%	Tidak Efisien
16	Memujudkan Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)						
17	Terlaksananya koordinasi konvergensi penurunan stunting di Kecamatan						
18	Menurunnya Angka Kematian Ibu						
19	Meningkatnya Posyandu Aktif						
20	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah						

Berdasarkan Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dari hasil capaian sasaran 20 sasaran terhadap capaian sasaran realisasi anggaran 3 program yang ada pada Kecamatan Kenohan, Dari 3 program yang dilaksanakan pada tahun 2023 terdapat 1 program yang mengalami tidak efisiensi yaitu Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar 11,57% dan yang efisien terdapat 2 Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 83,06% dan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik sebesar 93,47%

3.1.5 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Pencapaian realisasi target kinerja sasaran strategis ditunjang dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan. Adapun capaian kinerja program dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Analisis Program Pencapaian Target Kinerja Tahun 2023

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	100	94,44	94,44 %	SOP Tersedia	Rusaknya Peralatan Pendukung (Seperti Alat Perekaman E-KTP) Yang Memerlukan Perbaikan Cukup Lama Sehingga Menghambat Dalam Proses Pelayanan
		Tingkat aksesibilitas wilayah Kecamatan	86,36	86,36	86,36	100%	Koordinasi Forkopimcam Dengan Pihak Swasta dan Instansi Terkait Terlaksana Dengan Baik Sehingga Proses Perbaikan Jalan Yang Rusak Dapat Segera Diperbaiki	Rusaknya Jalan Akibat Bencana Alam (Banjir) Sehingga Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan Menurun
2	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Persen	35	11,57	33%	Rata-Rata Realisasi Serapan Anggaran DD dan ADD Seluruh Desa Di Wilayah Kecamatan Kenohan berjalan dengan baik	Kurangnya Koordinasi Aparatur Desa Menyampaikan Data Terkait Serapan Anggaran
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan yang aktif	Persen	100	87,24	87,24 %	Tingkat Antusias Warga Yang Cukup Tinggi Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Masih Kurangnya Sosialisasi Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dari Instansi Terkait
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	B (60-70)	65	76,92 %	Data Realisasi dan Pendukung Yang Dibutuhkan Dalam Pelaporan Tersedia	Kurangnya Pengarsipan Berkas Secara Berkala, Sehingga Ada Beberapa Data Dukung Yang Diminta Tidak

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
								Dapat Dipenuhi

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota tahun 2023 yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target mendapat nilai B (60-70) dan realisasi target di tahun 2023 mendapat penilaian sebesar 65. Target kinerja yang sudah ditentukan tercapai, dengan Capaian kinerja sebesar 76,92%. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu pejabat yang berkewajiban memberikan laporan tidak tepat waktu dalam pengisian dan pelaporannya serta kurangnya pengarsipan berkas secara berkala, sehingga ada beberapa data dukung yang diminta tidak dapat dipenuhi.

Dalam mempertahankan realisasi kinerja yang dilakukan oleh Kecamatan Kenohan yaitu akan berkoordinasi dan berkonsultasi ke Inspektorat wilayah Kabupaten Kutai kartanegara dan Bagian Organisasi dan tatalaksana Sekretariat Daerah tentang tata cara serta kelengkapan dokumen yang harus dilengkapi agar tingkat kepatuhan dalam pelaporan sesuai batas waktu yang ditetapkan.

2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Indikator kinerja Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik tahun 2023 yaitu Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP dengan target kinerja sebesar 99,44%. Ditahun ini target kinerja program tercapai sesuai target, ini dikarenakan pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kenohan semuanya sudah sesuai SOP dan standar pelayanan publik. Hasil ini didapat dari hasil survey yang diadakan kepada masyarakat yang mendapatkan pelayanan baik itu perijinan atau pun non perijinan. Hasil survey diolah sesuai standar perhitungan Indeks Kepuasan masyarakat dengan memenuhi berbagai kriteria penilaian.

Tabel 3.7

**LAPORAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
KECAMATAN KENOHAN
PERIODE: 1 JANUARI 2023 - 31 DESEMBER 2023**

No	Layanan	Indeks	Mutu
1	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS)	94.44	Sangat Baik
2	REKOM BANTUAN SOSIAL (BANSOS)	90.74	Sangat Baik
3	PEMBUATAN KK	86.42	Baik
4	PEMBUATAN KTP	86.37	Baik
5	PEMBUATAN AK.1	86.11	Baik
6	SURAT KETERANGAN PINDAH	85.42	Baik
7	SURAT KETERANGAN LAINNYA	83.33	Baik
8	PERBAIKAN KK	82.41	Baik
9	PERBAIKAN KTP	82.12	Baik

3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Indikator kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan tahun 2023 yaitu Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang aktif dengan target sebesar 100%. Target kinerja pada tahun ini tercapai hanya 11.57% dikarenakan kegiatan di tahun 2023 tidak berjalan sesuai dengan keinginan.

4) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Indikator kinerja Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa ditahun 2023 yaitu Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik dengan target 87,24%. Target kinerja 9 (sembilan) Desa mendapat predikat sangat baik.

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2023

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2023 yang ada pada Kecamatan Kenohan dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 91,21%, dari pagu sebesar Rp.30.635.484.520,- dan terealisasi sebesar Rp.27.941.589.993,- yang terdiri dari 4 (Empat) program 11 (sebelas) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan. Adapun realisasi anggaran dapat dilihat lebih rinci pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2023

Kode Rekening	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan	Capaian Realisasi	Sisa Anggaran
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85.000.000,00	42.500.000,00	50,00	42.500.000,00
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000,00	20.210.000,00	80,84	4.790.000,00
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000,00	9.600.000,00	96,00	400.000,00
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000,00	12.690.000,00	25,38	37.310.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.373.086.961,00	2.778.054.096,00	82,36	595.032.865,00
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	3.290.574.961,00	2.701.554.096,00	82,10	589.020.865,00
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	82.512.000,00	76.500.000,00	92,71	6.012.000,00
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	34.200.000,00	33.400.000,00	97,66	800.000,00
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	34.200.000,00	33.400.000,00	97,66	800.000,00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70.500.000,00	70.005.000,00	99,33	495.000,00
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	70.500.000,00	70.005.000,00	99,33	495.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	557.280.000,00	310.654.244,00	55,74	246.625.756,00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	49.570.000,00	99,14	430.000,00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.000.000,00	11.251.000,00	32,15	23.749.000,00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450.000.000,00	234.781.244,00	52,17	215.218.756,00
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20.000.000,00	15.052.000,00	75,26	4.948.000,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.145.656.050,00	1.049.000.000,00	91,56	96.656.050,00
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	361.280.050,00	355.400.000,00	98,37	5.880.050,00
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	600.000.000,00	514.000.000,00	85,67	86.000.000,00
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	184.376.000,00	179.600.000,00	97,41	4.776.000,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	487.003.559,00	466.189.337,00	88,39	49.616.668,00
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.900.000,00	2.895.000,00	99,83	5.000,00

7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	121.146.265,00	111.533.436,00	92,07	9.612.829,00
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	16.610.000,00	83,05	3.390.000,00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	342.957.294	335.150.901,00	97,72	7.806.393,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	267.975.000,00	251.047.904,00	93,68	16.927.096,00
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	267.975.000,00	251.047.904,00	93,68	16.927.096,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	23.973.158.950,00	22.407.490.412,00	93,47	1.565.668.538,00
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	430.839.000,00	7.720.000,00	1,79	423.119.000,00
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	23.542.319.950,00	22.399.770.412,00	95,15	1.142.549.538,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	606.624.000,00	529.199.000,00	28,34	77.425.000,00
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	30.000.000,00	28.550.000,00	95,17	1.450.000,00
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	576.624.000,00	500.649.000,00	86,82	75.975.000,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	35.000.000,00	4.050.000,00	11,57	30.950.000,00
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	17.500.000,00	0,00	00,00	17.5000.000,00
7.01.06.2.01.17	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	17.500.000,00	4.050.000,00	23,14	13.450.000,00
JUMLAH		30.635.484.520,00	27.941.589.993,00	91,21	2.693.894.527,00

Sedangkan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 realisasi penyerapan anggaran Kecamatan Kenohan sebesar **83,55%**, jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar **91,21%** terjadi kenaikan sebesar **8 %**. Adapun realisasi anggaran 2022 dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan	- Persentase Keluhan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan yang ditindaklanjuti	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	3.210.000.000,00	3.208.042.266,00	99,94%	1.957.734,00
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	3.210.000.000,00	3.208.042.266,00	99,94%	1.957.734,00

	- Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan non perijinan	10.000.000,00	9.600.000,00	96,00%	400.000,00
	-	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	3.200.000.000,00	3.198.442.266,00	99,95	1.557.734,00

Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	- Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat pada tahun berjalan maka wajib untuk ditindaklanjuti paling lambat 60 hari kerja - Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran Pengamanan Bidang Tanah - Persentase ketepatan waktu dan kesesuaian Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022) - Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.986.944.438,00	3.901.841.155,00	78,24 %	1.085.103.283,00
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.325.000,00	21.600.000,00	45,64 %	25.725.000,00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.800.000,00	8.400.000,00	50,00 %	8.400.000,00
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000,00	9.600.000,00	96,00 %	400.000,00

31 Maret 2022 - Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022 - Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah						
				20.525.000,00	3.600.000,00	17,54 %
				4.074.125.901,00	3.109.161.218,00	76,31 %
				3.991.613.901,00	3.037.221.218,00	76,09 %
				82.512.000,00	71.940.000,00	87,19 %
				34.200.000,00	34.200.000,00	100 %
						16.925.000,00
						964.964.683,00
						954.392.683,00
						10.572.000,00
						0,00
						0,00

		SKPD				
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	129.436.234,00	101.471.907,00	78,40 %	27.964.327,00
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	9.971.907,00	99,72 %	28.093,00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.000.000,00	0,00	0,00 %	5.000.000,00
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.280.000,00	0,00	0,00 %	2.280.000,00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	92.156.234,00	91.500.000,00	99,29 %	656.234,00
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20.000.000,00	0,00	0,00 %	20.000.000,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	501.857.303,00	461.540.782,00	91,97 %	40.316.521,00
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.900.009,00	2.899.000,00	99,97 %	1.009,00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.000.000,00	101.767.092,00	96,92 %	3.232.908,00
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	4.983.900,00	99,68 %	16.100,00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	388.957.294,00	351.890.790,00	90,47 %	37.066.504,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200.000.000,00	173.867.248,00	86,93 %	26.132.752,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	200.000.000,00	173.867.248,00	86,93 %	26.132.752,00

		Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	341.000.000,00	316.162.500,00	92.72 %	24.837.500,00
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	341.000.000,00	316.162.500,00	92.72 %	24.837.500,00
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	30.000.000,00	19.977.500,00	66.59 %	10.022.500,00
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	311.000.000,00	296.185.000,00	95.24 %	14.815.000,00
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.000.000,00	10.850.000,00	54.25 %	9.150.000,00
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.000.000,00	10.850.000,00	54.25 %	9.150.000,00
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10.000.000,00	6.100.000,00	61.00 %	3.900.000,00
		Koordinasi Pendampingan Desa diwilayahnya	10.000.000,00	4.750.000,00	47.50 %	5.250.000,00

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kenohan tahun 2023 merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah serta seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dan dapat sebagai sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Penyelenggaraan kegiatan di Kecamatan Kenohan pada Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun kedua dari Renstra Kecamatan Kenohan Tahun 2021-2026. Kecamatan Kenohan telah dapat merealisasikan pencapaian sasaran strategis pada tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Kenohan Tahun 2023 dapat tercapai melebihi target yang sudah ada, hasil capaian per-indikator sebagai berikut :

1. Capaian Tujuan Indikator Kinerja Utama

- a. Capaian Kinerja nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan diperoleh sebesar 76,92% (Sangat Tinggi) dari target Nilai 65

F. Capaian Sasaran Indikator Kinerja Utama

- a. Capaian kinerja Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti memperoleh nilai 94,44% (Sangat Tinggi).
- b. Capaian kinerja Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar 80% (Sangat Tinggi).
- c. Capaian kinerja Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa sebesar 11,57% (Sangat Rendah).
- d. Capaian kinerja Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan sebesar 0% (Sangat Rendah).

G. Capaian Sasaran Indikator Kinerja

- a. Capaian kinerja Temuan Administrasi BPK/ Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti sebesar 100% (Sangat Tinggi).

- b. Capaian kinerja Persentase Pelaksanakan dan Pelaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah sebesar 100% (Sangat Tinggi).
- c. Capaian kinerja Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa sebesar 100% (Sangat Tinggi).
- d. Capaian kinerja Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023 sebesar 100% (Sangat Tinggi).
- e. Capaian Kinerja Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023 sebesar 100% (Sangat Tinggi).
- f. Capaian Kinerja Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah sebesar 75,26% (Sedang)
- g. Capaian kinerja Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau sebesar 100% (Sangat Tinggi)
- h. Capaian Kinerja Jumlah Inovasi yang dibuat sebesar 0% (Sangat Rendah)
- i. Capaian Kinerja Capaian Output Kegiatan sebesar 100% (Sangat Tinggi)
- j. Capaian Kinerja Capaian Persentase realisasi kegiatan fisik sebesar 100% (Sangat Tinggi)
- k. Capaian Kinerja Capaian Persentase realisasi kegiatan keuangan sebesar 91,21% (Sangat Tinggi)
- l. Capaian kinerja Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari sebesar 100% (Sangat Tinggi)
- m. Capaian kinerja Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama sebesar 0% (Sangat Rendah)
- n. Capaian kinerja Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, Tim budaya kerja sebesar 25% (Sangat Rendah)
- o. Capaian kinerja Persentase Pengembangan Kompetensi ASN sebesar 100% (Sangat Tinggi)
- p. Capaian kinerja Penurunan Prevalensi stunting sebesar 195,33% (Sangat Tinggi)

- q. Capaian kinerja Angka Kematian Ibu (AKI) di kecamatan sebesar 40% (Rendah)
- r. Capaian kinerja Persentase Desa/ Kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) sebesar 95% (Sangat Tinggi)
- s. Capaian kinerja Persentase Posyandu Aktif sebesar 100% (Sangat Tinggi)
- t. Capaian kinerja Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran sebesar 100% (Sangat Tinggi)

Capaian kinerja Realisasi Anggaran tahun 2023 pun meningkat dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2023 capaian kinerja realisasi anggaran Kecamatan Kenohan sebesar 91,21% atau terjadi peningkatan kinerja sebesar 8%.

A. Perbaikan Kedepan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2023, maka rencana perbaikan kedepan dalam memperbaiki kinerja yang belum tercapai atau mencapai target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Kenohan akan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Inspektorat wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara terkait pemenuhan dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan dalam penilaian SAKIP,
- 2) Terkait predikat pengelolaan arsip perangkat daerah Kecamatan Kenohan yang sudah memenuhi target maka akan terus berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara terkait tata cara pengelolaan arsip dengan baik dan benar. Dimana selama ini Kecamatan Kenohan banyak mengalami kendala dalam pengelolaan arsip perangkat daerah. Hambatan yang dialami oleh Kecamatan Kenohan dalam mengelola arsip yaitu karena kurangnya sumber daya manusia, tidak ada arsiparis yang secara khusus mengelola arsip, belum adanya pelatihan tentang

kearsipan yang diberikan kepada aparatur kecamatan, serta sarana dan prasarana yang belum tersedia secara lengkap dalam mengelola arsip.

- 3) Akan lebih meningkatkan lagi pengawasan terhadap ASN yang belum melaporkan harta kekayaan di aplikasi LHKASN sebelum batas waktu yang ditentukan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kenohan Tahun 2023, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

4.2 Perbaikan Kedepan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2023, maka rencana perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

- 4) Kecamatan Kenohan akan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Inspektorat wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara terkait pemenuhan dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan dalam penilaian SAKIP,
- 5) Terkait predikat pengelolaan arsip perangkat daerah Kecamatan Kenohan telah memenuhi target maka akan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara terkait tata cara pengelolaan arsip dengan baik dan benar. Dimana selama ini Kecamatan Kenohan ada beberapa kendala dalam pengelolaan arsip perangkat daerah. Hambatan yang dialami oleh Kecamatan Kenohan dalam mengelola arsip yaitu karena kurangnya sumber daya manusia, tidak ada arsiparis yang secara khusus mengelola arsip, belum adanya pelatihan tentang kearsipan yang diberikan kepada aparatur kecamatan, serta perlunya sarana dan prasarana yang belum tersedia secara lengkap dalam mengelola arsip.
- 6) Akan lebih meningkatkan lagi pengawasan terhadap ASN yang belum melaporkan harta kekayaan di aplikasi LHKASN sebelum batas waktu yang ditentukan

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kenohan Tahun 2023, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Kenohan, 18 Februari 2024

Camat



H. KASPUL, SE, M.Si

NIP. 19680409 198903 1 005